



RAPBD 2015 Ahok Curigai Anggaran Penimbangan Sampah

Jasa penimbangan sampah dilakukan oleh perusahaan yang berbeda setiap tahun.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencurigai adanya anggaran senilai Rp 4,4 miliar untuk jasa penimbangan sampah di tempat pembuangan akhir Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015. “Enggak logis itu. Kami akan lagi teliti semuanya,” kata Ahok—sapaan Basuki—di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Ahok, ia akan mengontrol semua anggaran tak wajar melalui mekanisme *electronic budgeting*. Namun ia mengeluhkan para pejabat di lingkup satuan kerja perangkat daerah yang tak mau menggunakan fasilitas tersebut. Ia menilai pembangkangan para pejabat sebagai bentuk akal-akalan mereka untuk memainkan anggaran. “Pada 2015, kami lebih kejam lagi nih kayak bank. Semua produk uang harus masuk ke *e-budgeting*, biar kita bisa monitor dan evaluasi langsung.”

Dalam RAPBD 2015, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyediakan anggaran khusus untuk tempat pembuangan sampah terpadu Bantargebang senilai Rp 431,5 miliar. Dalam dokumen yang diperoleh *Tempo*, dana sebesar itu dibagi untuk tiga kegiatan di Dinas Kebersihan. Dana

senilai Rp 336 miliar dianggarkan untuk jasa pengelolaan sampah, sedangkan dana untuk jasa penimbangan sampah dipatok Rp 4,4 miliar dan jasa pengawasan independen pengelolaan sampah Rp 1,1 miliar.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Ediningtyas, mengatakan jasa pengelolaan sampah diserahkan ke PT Godang Tua Jaya dengan kontrak selama 15 tahun. Godang Tua selama ini menjadi pengelola kawasan pembuangan sampah seluas 110,3 hektare tersebut. Awalnya, *tipping fee* dibayarkan sebesar Rp 114 ribu per ton, yang kemudian meningkat menjadi Rp 123.452 pada tahun ini. Nilai tersebut hampir sama dengan yang tercatat pada tahun lalu. Sebelumnya, *tipping fee* diusulkan sebesar Rp 200 ribu per ton.

Untuk jasa penimbangan, Saptastri menyerahkan kepada pihak lain selain PT Godang Tua Jaya. Menurut dia, jasa penimbangan harus dilakukan oleh pihak ketiga. “Biar lebih independen,” kata dia, di Balai Kota, kemarin.

Saptastri mengatakan perusahaan yang mengelola jasa penimbangan berbeda-beda setiap tahun. “Setiap tahun berbeda karena dilelang,” kata dia. Sayangnya, ia tak menyebutkan nama perusahaan yang saat ini

menjalankan jasa penimbangan.

Anggota Komisi Infrastruktur DPRDDKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mempertanyakan penyerahan jasa penimbangan kepada pihak ketiga. “Kenapa tidak dilakukan oleh pemerintah saja?” ujar dia. Prabowo menilai alasan yang dikemukakan pemerintah tak masuk akal. Seharusnya, pihak ketiga disewa untuk melakukan pengawasan, bukan penimbangan.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Ucock Sky Khadafi, menyatakan nilai anggaran jasa penimbangan sangat tidak masuk akal. Menurut dia, anggaran tersebut cenderung berpotensi dikorupsi. “Ada potensi korupsi di sini,” ucapnya.

Seharusnya, pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi tidak masing-masing. Penanganan secara terpisah akan membuat biaya yang ada lebih tinggi. “Ini harus diatur kembali,” kata Ucock.

● ERWAN HERMAWAN